

TAJUK RENCANA

Momentum Bersih-bersih Kementerian

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta jajarannya seolah membuktikan bahwa lemb-a-ga antikorupsi ini masih digdaya. KPK ingin membuktikan bahwa ang-gapan publik selama ini yang me-nempatkan lembaga tersebut di ba-wah kekuasaan eksekutif (pemerin-tah) tidaklah benar. Pun lembaga an-tirasauk ini ingin menunjukkan kepa-da publik bahwa lembaga yang di-nakhodai Firlil Bahuri tidak terbang pi-lih.

Kita tentu mengapresiasi langkah KPK yang melakukan OTT terhadap Edhy dan keluarganya serta staf KKP dan pihak swasta selaku pemberi suap dalam kasus ekspor benih lob-ster yang nilainya kurang lebih Rp 9,8 miliar. Meski masih ada kasus yang lebih besar lagi yang belum terung-kap tuntas, seperti kasus BLBI yang nilainya triliunan rupiah, kita tetap mendukung langkah KPK membe-rantas praktik korupsi di semua lini, berapapun nilainya.

Gebrakan KPK yang berani me-nangkap menteri sekaligus menjadi jawaban atas keraguan publik ter-hadap independensi lembaga antiko-rupsi ini. Meskipun kita akui langkah KPK belum maksimal, namun seti-daknya OTT yang dilancarkan di Kementerian Kelautan dan Perikan-an ini menjadi preseden baik untuk mengungkap kasus korupsi besar lainnya. Menteri KKP yang notabene pembantu presiden adalah simbol kekuasaan eksekutif di bidang kelaut-an dan perikanan yang ternyata tidak kebal hukum.

Perkembangan terbaru, KPK melakukan pengegedahan kantor KKP dan menemukan sejumlah uang

asing dan rupiah serta dokumen yang kini masih dianalisis. Kita yakin dengan penemuan tersebut, akan makin banyak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Edhy pun dengan *legawa* menyerahkan jabatan men-teri yang dipegangnya kepada Presi-den Jokowi. Siapa yang bakal meng-ganti Edhy Prabowo sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Dalam konteks itulah kita ingin mengingatkan kepada Presiden un-tuk memilih calon menteri pengganti Edhy Prabowo dari kalangan yang dikenal punya integritas moral dan kapabel, atau menguasai bidangnya. Kita khawatir bila penggantian menteri hanya didasarkan pada un-sur politik yang notabene menjadi jatah parpol. Menteri yang mem-bidangi kelautan dan perikanan hen-daknya juga bukan dari kalangan pengusaha yang notabene punya potensi konflik kepentingan.

Usulan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) agar menteri yang baru nanti berani men-cabut regulasi terkait ekspor benih lobster kiranya patut dipertimbang-kan. Tapi bukan berarti sumber ma-salah korupsi hanya berasal dari regulasi, melainkan juga dari unsur pelaksana kebijakan. Sehingga, ke-duanya baik regulasi maupun pelak-sana kebijakan harus benar-benar bersih dan tidak memberi peluang untuk melakukan korupsi. Regulasi di bidang ekspor benih lobster tetap perlu dikaji dan dievaluasi, sementara pelaksananya juga harus punya in-tegritas moral sehingga tak melaku-kan korupsi. OTT terhadap Edhy Prabowo semestinya menjadi mo-mentum untuk melakukan bersih-bersih, bukan hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga kementerian lainnya. □

CORONA virus disease (Covid)-19 telah membawa perubahan besar masyarakat. Semua bicara pandemi Covid-19, yang sudah berjalan 8 bulan dan belum tampak tanda-tanda berhenti. Pasien positif Covid-19 secara nasional sudah mencapai 527.999 dan angkanya terus menaik. Sementara pasien mening-gal 16.646. (KR, 29/11). Tragisnya, selain menyengat kesehatan warga, pandemi Covid-19 II juga bisa dikatakan ‘meroboh-kan’ ekonomi Indonesia.

Adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan pertumbuhan Indonesia kuartal ketiga mengalami kontraksi 3.49%. Ekonom menyata-kan, situasi ini menandakan Indone-sia telah memasuki jurang resesi. Sehingga untuk meningkatkan daya beli, pemerintah makin gencar menggelontorkan dana untuk pemu-lihan ekonomi bersamaan pengan-dalian Covid-19.

HIV&AIDS

Ketika seluruh perhatian bahkan dana tercurah pada penanggulangan wabah Covid-19, kita tidak lupa adanya beberapa persoalan kesehatan yang selama ini sudah kita hadapi dan sampai sekarang juga masih menjadi ancaman. Selain ancaman demam berdarah, TBC yang masih mengintai juga ada *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deiciency Virus* (HIV&AIDS).

Harus diakui, pandemi Covid-19 meng-hambat penanganan HIV&AIDS. Empat tahun lalu, PBB menetapkan tujuan un-tuk membatasi infeksi HIV dan mening-kan pengobatan di akhir tahun 2020, namun kondisi pandemi membuatnya terhambat. Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima menyebutkan bila kita sudah ke luar jalur dari target 2020, kare-na Covid-19 benar-benar mengancam.

World Health Organization (WHO) bahkan mengatakan, pandemi Covid-19 ikut membuat dampak pada perawatan orang dengan HIV/AIDS. Dalam konfe-rensi pers di Konferensi AIDS Inter-

Fadmi Sustiwi

nasional (7/7/20) Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengata-kan bahwa pandemi membuat berku-rangnya akses obat-obatan HIV. Tedros melalui laman resmi WHO mengatakan, 73 negara telah melaporkan bahwa me-reka berisiko kehabisan obat antiretroviral (ARV).

Penanganan Covid-19 menjadi prioritas di banyak negara, termasuk Indonesia.



KR-JOKO SANTOSO

Namun kita tidak boleh lupa dan abai de-ngan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Meski estimasi jumlah kasus HIV&AIDS di Indonesia sebanyak 640.443, data ter-laporkan sejak 1987 – Maret 2020 hanya 515.955 (79,95%). Artinya, masih ada 128.499 ODHA tidak terdeteksi dan dikhawatirkan menjadi matarantai penu-laran HIV&AIDS, karena tidak me-nyadari bila dirinya menyimpan virus da-lam tubuhnya.

Indonesia Bebas

Realita ini kian menipiskan harapan Indonesia Bebas AIDS 2030, atau menca-pai *Three Zero* : tidak ada lagi penularan baru HIV, tidak ada kematian akibat

AIDS dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Upaya mewujudkan itu dilakukan dengan di-canangkan strategi Fast Track 90 – 90 – 90 yang dilakukan sejak 2017. Realitanya adalah dengan mempercepat pencapaian 90% orang mengetahui status HIV melalui tes atau deteksi dini. 90% dari ODHA yang mengetahui status HIV memulai terapi ARV. Kemudian 90% ODHA berhasil menekan jumlah virus se-hingga mengurangi kemungkinan penu-laran HIV serta taka da lagi stigma dan diskriminasi ODHA.

Keterbatasan stok ARV di Indonesia adalah menjadi persoalan tak pernah usai, sejak sebelum pande-mi. Padahal ARV sangat membantu pengidap HIV bertahan hidup. Dan ini menjadi persoalan seluruh negara di dunia. Sehingga Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus merekomendasikan semua negara meresepkan ARV untuk jangka wak-tu lebih lama, hingga 6 bulan untuk menopang rantai pasokan.

Realita yang bukan hanya memri-hatinkan. Namun persoalan serius dan harus mendapat perhatian. Ketika pandemi berdampak pada rantai pasokan, ketersediaan dan ak-sesibilitas ARV di tanah air, ODHA akan terdampak. Pasien HIV yang tidak melakukan pengobatan ARV dan virusnya belum tersupresi, dimungkinkan memiliki sistem kekebal-an tubuh yang lemah. Sehingga menjadi rentan terinfeksi virus korona. Jika dem-i-kian, siapa bertanggung jawab? □

*) *Fadmi Sustiwi, wartawan pemerhati kasus HIV&AIDS*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih parti-sipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fo-tocopy identitas. Terimakasih.



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Komunikasi Masa Pandemi

DUNIA pendidikan harus terus bergerak untuk memastikan layan-an pendidikan yang optimal di masa pandemi Covid-19. Sudah sepan-tasnya guru menjadi pelayan peser-ta didik dalam kegiatan pembela-jaran agar terus berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ten-tang Guru dan Dosen.

Metode pembelajaran jarak jauh secara daring sampai saat ini men-jadi metode yang paling direkom-endasikan untuk menjamin pembela-jaran tetap terlaksana. Meski ba-nyak kendala dalam pelaksanaan pembelajaran melalui gawai. Kemampuan komunikasi meru-pakan salah satu kesulitan yang perlu disikapi oleh pendidik masa pandemi Covid-19.

Ketika pembelajaran tatap layar berlangsung, peserta didik hanya mengandalkan komunikasi dengan guru lewat gawai untuk meminta penjelasan materi pelajaran. Me-reka resah ketika bertanya lewat WA tak kunjung dijawab. Pesan yang dikirimkannya sekadar dibaca, tetapi tidak dibalas. Padahal siswa membutuhkan jawaban itu untuk memastikan tugas dari guru. Oleh karena itu, guru harus menjaga pe-layanan yang komunikatif kepada peserta didiknya.

Guru yang mengaktifkan tanda bahwa pesan dari siswa telah diteri-ma merupakan awal komunikasi agar bersambut. Penanda tersebut

merupakan alat bantu untuk men-dorong pemakainya berkomunikasi timbal balik secara adil. Saat pen-didik membuka dan menerima pes-an, siswa akan mengetahui pesannya sudah dibaca. Hal ini akan memberikan harapan pada peserta didik bahwa pesannya akan berbalas jawab. Jika penerima pes-an masih di tengah kesibukan, ja-wablah secara singkat dulu menge-nai posisi dan waktu untuk men-jawabnya.

Ketika bertanya lewat gawai merupakan sarana mendidik, maka komunikasi tersebut merupakan wujud pelayanan guru yang baik da-lam situasi pandemi. Jika demikian guru pun sebenarnya sedang mempraktikkan hakikat mendidik yakni mengajarkan tata krama dalam berkomunikasi lewat gawai. Guru dapat memanfaatkan praktik komu-nikasi dengan muridnya sebagai ke-sempatan untuk membenahi cara bertutur siswa di media teknologi. Pendidik yang komunikatif akan menjalin kedekatan dengan peserta didik.

Komunikatifnya seorang guru erat dengan kerelaannya untuk mela-yani dan berbagi. Melayani siswa dengan rela hati akan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi para murid. Semoga para guru dap-at membangun komunikasi yang berarti di masa pandemi. □

*) *Suprapti, Guru SDN Kenaran 1 Prambanan, Sleman.*

KAPOLRI Jenderal Polisi Idham Azis kembali membuat terobosan keberanian dan layak diapresiasi yakni mencopot dua Kapolda sekaligus. Yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Kedua Kapolda tersebut di-copot karena dinilai tidak menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19. Jabatan Kapolda Metro Jaya saat ini adalah Irjen Pol M Fadil Imran, yang se-belumnya menjabat Kapolda Jawa Timur. Sedangkan Kapolda Jawa Barat dijabat oleh Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Ahmad Dofiri. Ahmad Dofiri pernah menjabat sebagai Kapolda DIY.

Selama menjabat sebagai Kapolda DIY, setidaknya ada tiga kasus besar yang sempat menjadi perhatian publik. Pertama, kasus kekerasan jalanan atau ‘klithih’. Kedua, kasus berita hoaks yang mencatut nama Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Ketiga, berhasil mengusut dua aksi teror yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Aksi berwujud pembakaran motor di Dusun Mejing Lor Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping (24/3/2019). Juga membekam diler kendaraan di Desa Giripeni Wates, Kulonprogo (26/3/2019).

Calon Kapolri

Kapolri Idham Azis akan pensiun 31 Januari 2021 mendatang. Tentunya per-saingan rivalitas bursa para jenderal calon Kapolri sudah mulai menghangat. Masyarakat mengharapkan sosok Kapolri nantinya semakin lebih baik da-lam hal penegakan hukum tanpa pan-dang bulu. Pengangkatan dan pember-hentian Kapolri diatur UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan bunyi pasal 11 : (1) *Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan per-setujuan Dewan Perwakilan Rakyat.* (2)

Baharuddin Kamba

Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai de-ngan alasannya. (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban da-lam waktu sebagaimana dimaksud da-lam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhen-tikan sementara Kapolri dan mengang-kat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memper-hatikan jenjang kepang-katan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri se-bagaimana dimaksud da-lam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (8) Ketentuan mengenai peng-angkatan dan pemberhen-tian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut de-ngan Keputusan Kapolri.

Jika mengaju pada pasal 11 dalam UU Nomor 2 ta-

hun 2020 ini, Presiden Joko Widodo memiliki peran penting dalam penggan-tian Kapolri Idham Azis. Tentunya Kapolri pilihan secara subjektif dari se-orang presiden. Selama loyalitas kepada Presiden Jokowi, pasti menjadi salah satu pertimbangan untuk mengusulkan kepada DPR.

Harapan Baru

Yang perlu diingnt adalah Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang penuh kejutan dan di luar dugaan ba-nyak orang dalam memilih strategis seperti Kapolri. Siapapun Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis nanti lebih dekat kepada masyarakat sebagai pelindung, payogom dan pelayan masyarakat. Semoga saja bakal muncul Kapolri se-perti Jenderal (Purn) Polisi Hoegeng Iman Santoso. Sosok polisi yang dikenal kesederhanaan, jujur, penuh integritas dan berani dalam mengambil keputus-an. Kita tunggu. □

*) *Baharuddin KambaKadiv Humas Jogja Police Watch*

Pojok KR

Diusulkan, regulasi ekspor benih lobster di-cabut.
-- Bisa jadi bukan soal regulasi, tapi pelaksananya.

DIY sudah 7 kali perpanjang tanggap darurat.
-- Semua demi keselamatan masyarakat.

Cegah covid-19, wapadai lburan akhir tahun.
-- Belajarlah dari pengalaman.

Berale

Kedaulatan Rakyat

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkryk23@yahoo.com, iklankrkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'.. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.